

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010*, hlm. 102.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994*, hlm. 31.
- Andi Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94.
- Chaerudin DKK. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Dipraja, A. S. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Djaja, E. (2006). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Erdianto Efendi, S. M. H. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hal.142.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.
- Hegel. (2007). *Filsafat Sejarah GWE Hegel* (P. Pelajar (ed.); Cetakan II).
- Helbert Edelherz. (1977). *The Investigation of White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies, Us Department of Justice, Office of Regional Operation, Law Enforcement Assistance Administration 1977*.
- HLM. Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.
- Juniadi Suwantojo. (1997). *Korupsi: Pola penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya*.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung SH. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.hlm 105
- M. Natsir Asnawi. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), h. 13.

- Marwan Effendy. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta 2012.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23.
- Mukti Arto. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), Hal 140.
- Peter Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 35.
- Rusli Muhammad. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2006). hal. 124-125.
- Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Yusti Probowati Rahayu. (2005). *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 91.

JURNAL

- Ana Aniza Karunia. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 20(1), 123.
- DWI HANANTA. (2018). PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 97.
- Gorbunova, Larisa V. Et. Al. (2015). Aggravating Circumstances, Significance And Correlation With Qualifying Signs. *Mediterranean Journal Of Social Science*. 6 (3).70.
- Idris, A. C. I. (2017). Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst). *Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.*, 3(1), 211.
- Ismail Ghonu. (2015). INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum: JUSTITIA*

EX PAT, 31(2), 19.

- L. D., L. (2008). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif). *Jurnal Education And Development.*, 2(208), 122.
- LA GURUSI. (2017). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(2), 142.
- Mahardika & Firman. (2018). Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama.*, 1, 2.
- Mangun. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurna Penelitian Hukum*, 10.
- OTTI ILHAM KHAIR. (2022). ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA. *ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 2.
- PASMATUTI, D. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ensiklopedia Social Review*, 1, 101.
- Sovianti, R., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 1(1), 48. <http://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/komaskam/article/view/450>
- Sri Mulyani. (2016). PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG_UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 341.
- W, Tantowi, Saraswati N. G. A. N., & Gayatri, V. S. (2021). Problematika Kebijakan Penegakan Hukuman Pidana Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta: *UIR Law Review*.
- Yolanda, Elvara, Usman, & E. S. (2022). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Criminal*, 3(2), 138.

KARYA ILMIAH

Paturusi, A. N. P. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara. 1–137.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU NO. 31 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

CNBC Indonesia. (2021). Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Bui Dalam Korupsi Bansos. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210728141604-4-264312/eks-mensos-juliari-dituntut-11-tahun-bui%02dalam-korupsi-bansos%0A>

CNN INDONESIA. (2021). Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos Jadi Tersangka. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206075413-532-578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka>.

Kompas.com. (2021a). *Alasan Keringanan Hukuman Juliari Dinilai Mengada-ada*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14033271/alasan-keringanan-hukuman-juliari-dinilai-mengada-ada>

Kompas.com. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Penulis : Wahyuni Sahara Editor : Wahyuni Sahara. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

Newsdetik.com. (2021). *Pukat UGM Nilai Hinaan Terhadap Juliari Harusnya Jadi Pemberat Hukuman*. <https://news.detik.com/berita/d-5693805/pukat-ugm-nilai-hinaan-terhadap-juliari-harusnya-jadi-pemberat-hukuman>